

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

SKRIPSI

**PENGARUH KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK TERHADAP
PERMINTAAN KENDARAAN BERMOTOR DAN DAMPAKNYA
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI PROPINSI SUMATERA SELATAN**



**Diajukan Oleh:
BUNGA DIAH WAHYUNI
01033120006**

**Untuk Memenuhi dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2007**

352.135
Wah
P
2007

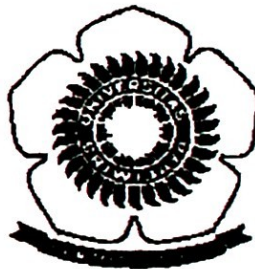
15853
16215

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**



SKRIPSI

**PENGARUH KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK TERHADAP
PERMINTAAN KENDARAAN BERMOTOR DAN DAMPAKNYA
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI PROPINSI SUMATERA SELATAN**



**Diajukan Oleh:
BUNGA DIAH WAHYUNI
01033120006**

**Untuk Memenuhi dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2007**

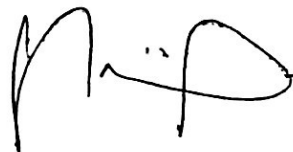
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Bunga Diah Wahyuni
NIM : 01033120006
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Mata Kuliah : Keuangan Daerah
Judul Skripsi : Pengaruh Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Permintaan Kendaraan Bermotor dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan

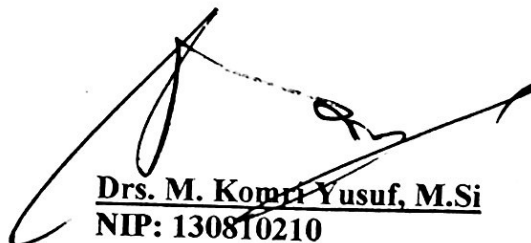
PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

Tanggal: 1 Mei 2007 Ketua



DR. H. Syamsurijal AK
NIP: 130900942

Tanggal: 1 Mei 2007 Anggota



Drs. M. Komari Yusuf, M.Si
NIP: 130810210

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF

Nama : Bunga Diah Wahyuni
NIM : 01033120006
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Mata Kuliah : Keuangan Daerah
Judul Skripsi : Pengaruh Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Permintaan Kendaraan Bermotor dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan

Telah dipertahankan di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 15 Mei 2007 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Ketua



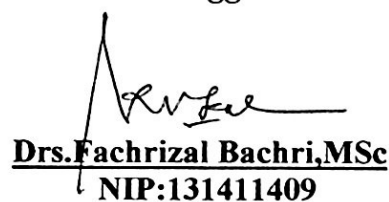
DR. H. Syamsurijal AK
NIP: 130900942

Anggota



Drs. M. Komri Yusuf, Msi
NIP: 130810210

Anggota



Drs. Fachrizal Bachri, MSc
NIP: 131411409

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

DR. Taufik Marwa, SE, Msi
NIP: 132050493

Motto :

*"Barang Siapa yang Menempuh Perjalanan Untuk Menuntut Ilmu
Maka Allah Memudahkan Baginya Jalan Menuju Surga".*

(H.R. Muslim)

Kupersembahkan Kepada :

- *Papa dan Mama Tercinta*
- *Keluarga Besarku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Pengaruh Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Permintaan Kendaraan Bermotor dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan.**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini penulis banyak terdapat kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran guna penyempurnaan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak DR.H. Syamsurijal AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ketua Pembimbing Skripsi atas bantuan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak DR. Taufik Marwah, SE, MSi selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan.
3. Bapak Drs.M. Komri Yusuf, MSi selaku Anggota Pembimbing Skripsi atas bantuan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu DR.Bernadete Robiani, MSc selaku Pembimbing Akademik selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya untuk semua nasehat dan motivasinya.

5. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Kedua orang tuaku yang tercinta dan semua keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materil hingga penulis bisa menyelesaikan kuliah.
7. Nick atas semuanya yang diberikan selama ini semoga Allah membalasnya.
8. Staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya: Yuk Rositaku tersayang, Mbak Ninil, Yuk Ita dekanat, Enny, Yuk Semi, Kak Okta, Kak Indana, Kak Okta, Kak Jo, Pak Warindi, Pak Tutar.
9. Seluruh Teman-teman seperjuangan dan seangkatan di Ekonomi Pembangunan 2003: Reni, Etty, Why, Evi, Lita, Pipit, Nia, Fet, Ria, Yadi, Rizky, Yan, Acen, dll atas setiap kebersamaan kita.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas budi baik dan berkah kepada kita semua dan semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Inderalaya, 1 Mei 2007

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap permintaan kendaraan bermotor dan dampaknya terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Propinsi Sumatera Selatan selama periode 1996-2005. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan dan hasil publikasi institusi yang terkait.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif kemudian yang diformulasikan dalam suatu model persamaan rasio dan *semi logaritma natural*. Hasil dari persamaan (1) menunjukkan bahwa harga BBM, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap rasio Jumlah Kendaraan Bermotor dengan R^2 sebesar 0,720 yang menunjukkan variasi sebesar 72 persen rasio Jumlah Kendaraan Bermotor dipengaruhi oleh harga BBM, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk.

Hasil persamaan (2) menunjukkan bahwa Jumlah Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dengan R^2 sebesar 0,352 atau 35,2 persen variasi Pajak Kendaraan Bermotor dipengaruhi oleh Jumlah Kendaraan Bermotor.

Kata Kunci : Harga BBM, Jumlah Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out of the influences of increasing fuel price of vehicles sum and ultimate of Vehicles Tax Revenue in Prov. Sumatera Selatan. This research use secondary data obtained from Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sumatera Selatan and publication of authority institutions.

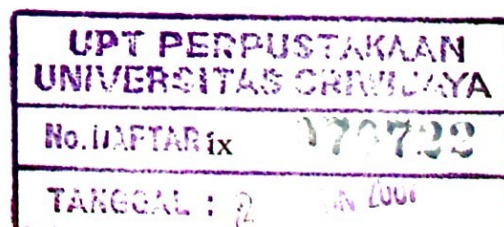
Analysis used in this research was qualitative and quantitaf analysis and formulated in Ratio and semi logaritma natural. The result of comparison (1) indicated that fuel price, capital income dan population have significantly effect to ratio vehicles sum. The R^2 value is 0,720. It means that 72 percent ratio vehicles sums effect by petrol oil price, capital income dan population.

The result of comparison (2) indicated that ratio vehicles sum have significantly effect to Vehicle Tax Revenue with R^2 value is 0,352 it means that 35,2 percent Vehicle Tax Revenue effect by ratio vehicles sum.

Keyword: Fuel Price, Vehicles Sum, Vehicle Tax Revenue

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	12
I.3. Tujuan	12
I.4. Manfaat	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
II.1. Landasan Teori	14
II.1.1. Peranan Pemerintah dalam Perekonomian	14
II.1.2. Otonomi Daerah	17
II.1.3. Pendapatan Asli Daerah	19
II.1.4. Pajak	20
II.2. Penelitian Terdahulu	21
II.3. Kerangka Pemikiran	21
II.4. Hipotesis	23



BAB III. METODE PENELITIAN

III.1. Ruang Lingkup Penelitian	24
III.2. Data dan Sumber Data	24
III.3. Batasan Variabel Operasional	24
III.4. Teknik Analisis Data	26

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.1. Keadaan Geografis dan Luas Wilayah	32
IV.1.2. Jarak dari Palembang ke Kabupaten/Kota	32
IV.1.3. Jalan dan Panjang Jalan	33
IV.1.4. Wilayah dan Administrasi Penduduk	34
IV.2. Keadaan Perekonomian Propinsi Sumatera Selatan	37
IV.2.1. Pertumbuhan Ekonomi	37
IV.2.2. Perkembangan Pendapatan Perkapita	40
IV.3. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor	41
IV.4. Pajak Daerah	44
IV.5. P K B dan B B N K B	46
IV.6. Kontribusi P K B terhadap Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Sumatera Selatan	49
IV.7. Pengaruh Kenaikan Harga BBM terhadap P K B dan Dampaknya terhadap Penerimaan P K B di Prop. Sumatera Selatan	53
IV.7.1. Pengujian Statistik	56

IV.7.2. Analisis Ekonomi Pengaruh Kenaikan Harga BBM terhadap Permintaan Kendaraan Bermotor dan Dampaknya terhadap Penerimaan P K B di Prop. Sumatera Selatan	59
IV.7.3. Pengujian Ekonometrika.....	62
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
V.1. Kesimpulan.....	66
V.2. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Subsidi BBM di Indonesia	9
Tabel 4.1.	Panjang Jalan Prop. Sumatera Selatan.....	33
Tabel 4.2.	Jumlah Penduduk Prop.Sumatera Selatan	36
Tabel 4.3.	Pertumbuhan Ekonomi Prop.Sumatera Selatan.....	38
Tabel 4.4.	Pendapatan Reg. Perkapita Prop.Sumatera Selatan.....	40
Tabel 4.5.	Jumlah Kendaraan Bermotor Prop.Sumatera Selatan.....	42
Tabel 4.6.	Penerimaan Pajak Daerah Prop.Sumatera Selatan	44
Tabel 4.7.	Penerimaan PKB dan BBNKB Prop.Sumatera Selatan	46
Tabel 4.8.	Penerimaan PKB dan BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah Prop. Sumatera Selatan.....	48
Tabel 4.9.	Kontribusi Penerimaan PKB terhadap Pajak Daerah Prop. Sumatera Selatan	50
Tabel 4.10.	Tabel Uji Gejala Heterokedastisitas	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Penerimaan APBD dan PAD Prop. Sumsel	6
Gambar 1.2.	Penerimaan PKB dan BBNKB Prop.Sumsel.....	7
Gambar 1.3.	Jumlah Kendaraan Bermotor Prop.Sumsel	8
Gambar 1.4.	Kenaikan Harga BBM di Indonesia.....	11
Gambar 2.1.	Kerangka Pemikiran.....	23
Gambar 3.1.	Kurva Uji t.....	28
Gambar 3.2.	Aturan Uji Durbin-Watson.....	31
Gambar 4.1.	Kurva Normal untuk Harga BBM	55
Gambar 4.2.	Kurva Normal untuk Pendapatan Perkapita.....	56
Gambar 4.3.	Kurva Normal untuk Jumlah Penduduk.....	57
Gambar 4.4.	Kurva Normal untuk Rasio JKB.....	58
Gambar 4.5.	Kurva F-Tes.....	59
Gambar 4.6.	Hasil Uji Durbin-Watson.....	64

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah antara lain adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja guna memwujudkan tujuan tersebut pemerintah daerah dan masyarakat secara bersama-sama harus memiliki inisiatif dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan masyarakat berdasarkan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga dapat merancang dan membangun perekonomian daerah. Potensi sumber daya yang dimiliki tersebut dapat dikembangkan dan dapat digunakan membiayai kegiatan pembangunan daerah pada sektor-sektor yang produktif. Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan yang sampai saat ini mempunyai peranan yang cukup penting. Untuk menggali sumber dana yang diperlukan suatu perencanaan yang matang untuk menghindari kekeliruan dalam melakukan prediksi pendapatan dimasa yang akan datang, sehingga tidak realistiknya anggaran pendapatan. (Selamat Bamim,2002:107).Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah. Indonesia mengembangkan sistem otonomi daerah guna membangun semangat baru daerah.

daerah propinsi untuk lebih mengembangkan daerahnya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri tanpa bergantung sepenuhnya lagi dengan pemerintah pusat. Dikembangkannya sistem otonomi daerah ini secara tidak langsung membuat setiap daerah propinsi untuk berkreaitif dan berinovasi demi kemajuan daerah pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. (Febi Bahtara,2005:1)

Penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang No 32 tahun 2004, telah memberikan wewenang yang luas , nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan kewenangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip- prinsip demokrasi, peran serta dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai konsekwensi dari luasnya kewenangan yang diberikan kepada daerah makan tuntutan kebutuhan akan pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin besar pula, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang memadai agar tidak terjadi penggunaan tidak realistiknya anggaran pendapatan.

Sementara itu dengan semakin maju dan berkembangnya masyarakat serta bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat, maka kegiatan dan pengeluaran masyarakat semakin meningkat. Hal ini akan meningkatkan pengeluaran pemerintah guna membiayai kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat.

Untuk itu pemerintah harus mengupayakan peningkatan sumber penerimaan daerah yang salah satunya melalui pemungutan pajak.

Pajak merupakan salah satu alat penting bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan ekonomi, politik dan sosial yang mengandung sasaran sebagai berikut (Mohammad Zain, 2000:45), yaitu:

- a. Pengalihan sumber-sumber dana dari sektor swasta ke sektor pemerintah.
- b. Pendistribusian penghasilan secara riil dalam kelas-kelas penghasilan (*vertical equity*) dan secara merata terhadap masyarakat yang berpenghasilan sama (*horizontal equity*).
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan perluasan kesempatan kerja.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu bagian dari penerimaan negara dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Komponen-komponen sumber penerimaan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 adalah :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Komponen diatas merupakan sumber penerimaan daerah otonom, dimana diberikan hak dan kewajiban oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam membiayai kegiatan pembangunan daerahnya masing-masing.

Adapun unsur-unsur dari Pendapatan Asli Daerah meliputi:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain:
 - Penjualan Kekayaan Daerah
 - Keuntungan selisih nilai tukar Rupiah dengan valuta asing
 - Jasa Giro
 - Komisi, potongan
 - Pendapatan Bunga dan lain-lain.

Sesuai dengan tuntutan daerah akan kebutuhan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan tersebut, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah , telah diatur secara tegas mengenai alokasi sumber keuangan yang menjadi bagian untuk Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten /kota. Pada kenyataan dalam melaksanakan otonomi daerah , faktor penting yang harus menjadi perhatian antara lain adalah faktor ketersediaan dana untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di daerah, untuk itu pendapatan daerah (PATDA) adalah suatu hal yang mutlak harus menjadi perhatian yang serius

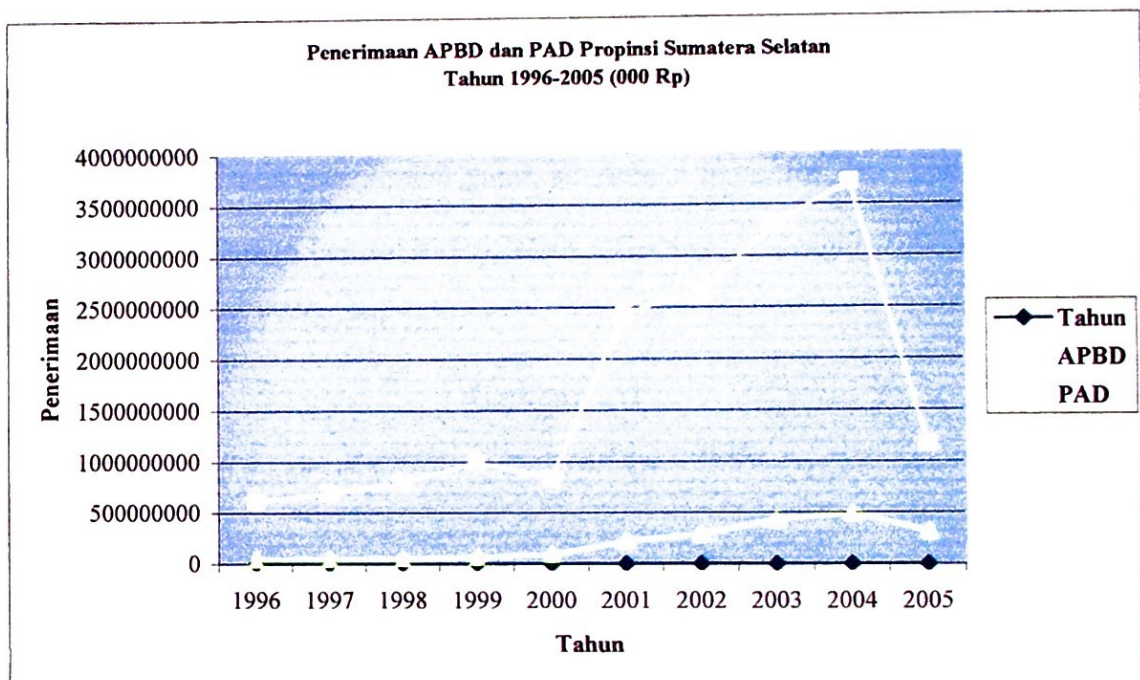
baik dalam pengelolaan maupun pengembangan sumber-sumber punggutannya. Pada era otonomi daerah , kemandirian suatu daerah betul-betul akan dilaksanakan yang implementasinya antara lain akan diwujudkan dalam bentuk kewenangan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Pendapatan Daerah (PATDA) pada umumnya yang merupakan kebijakan kewenangan di era otonomi daerah dewasa ini. (Suwardi,2005:1)

Dalam mengelola keuangan daerah salah satu unsur yang cukup menentukan adalah bagaimana pemerintah daerah mampu untuk mengelola dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, karena kemampuan dan kemandirian suatu daerah dilihat dari seberapa besar PAD daerah tersebut dapat digali dan direalisasikan sesuai dengan potensi daerah tersebut.

Salah satu ciri kemampuan suatu daerah otonomi dalam menyelenggarakan otonomi daerah ditentukan oleh kemampuan dibidang keuangan daerah. Melalui kewenangan tersebut oleh kemampuan di bidang kemampuan untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan jalan menggali sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Penerimaan daerah dari bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Sumatera Selatan terdiri dari pajak daerah. Retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Realisasi penerimaan Pendapatan Daerah adalah merupakan suatu gambaran yang mencerminkan potensi kemampuan suatu daerah dalam menyediakan dana dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah. Realisasi Penerimaan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau PATDA Propinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

Gambar 1.1



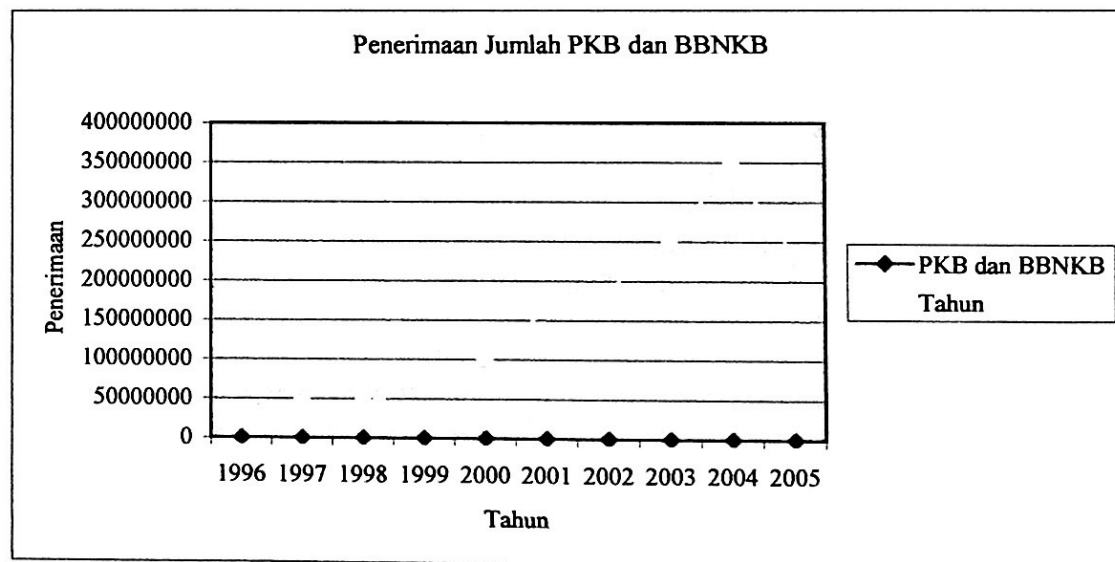
Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada setiap tahunnya rata-rata 10,06 persen . Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan anggaran pendapatan pada penyusunan APBD setiap tahun, hal tersebut mencerminkan masih dominannya ketergantungan pemerintah daerah akan subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu penerimaan yang berasal dari daerah sendiri perlu dioptimalkan,



dengan harapan pada saatnya nanti penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan lebih besar daripada dana dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

Banyak sumber-sumber potensi yang dapat digali oleh daerah otonom untuk meningkatkan pendapatan daerahnya sendiri, salah satunya adalah pajak daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Perkembangan jumlah pajak kendaraan bermotor dan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 1996 sampai dengan 2005 dapat dilihat pada gambar grafik 1.2 berikut ini:

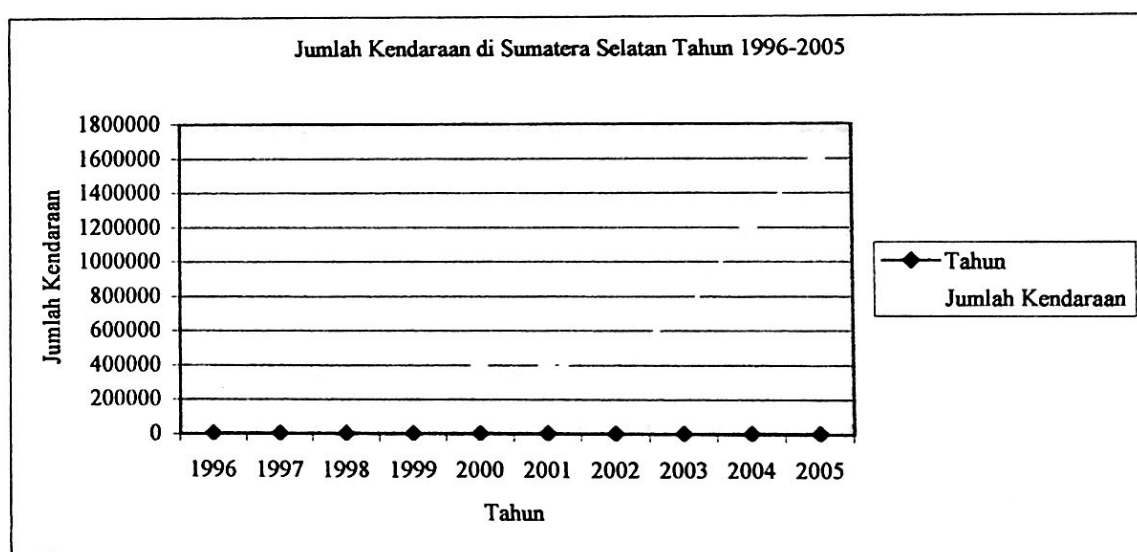
Gambar 1.2



Gambar 1.2 menunjukkan bahwa penerimaan jumlah dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor mengalami fluktuatif, dengan rata-rata pertumbuhan jumlah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada setiap tahunnya meningkat sebesar 29,67 persen.

Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Propinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 1996 sampai dengan tahun 2005 maka semakin tinggi juga penerimaan pajak dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat. Jumlah kendaraan di Propinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini:

Gambar 1.3



Pertumbuhan sektor transportasi diperkirakan masih cukup tinggi yang akan berakibat pada tingginya permintaan energi khususnya bahan bakar minyak. Konsumsi energi di sektor transportasi dipengaruhi oleh tingkat pergerakan dan aktivitas manusia dalam menunjang kegiatan ekonomi. Bentuk kegiatan tersebut

pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap jumlah kendaraan, konsumsi energi dan prasarana transportasi (Nahnuddin dan Atik, 2005:55-56).

Faktor utama yang sangat mendukung sektor transportasi adalah harga bahan bakar minyak (BBM) yang selalu disubsidi oleh pemerintah sehingga harga bensin dan solar tergolong murah. Subsidi pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia (Triliyun Rp)

Tahun	Subsidi BBM
1996/1997	2,585
1997/1998	18,482
1998/1999	25,200
1999/2000	38,140
2000/2001	22,450

Sumber : www.ppdn_pu@indo.net.id

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat subsidi pemerintah terhadap bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 1996/1997 subsidi yang diberikan kepada masyarakat pengguna BBM adalah sebesar 2,585 triliyun rupiah dan merupakan subsidi terendah selama kurun waktu 1996/1997 sampai tahun 2000/2001, sedangkan subsidi yang tertinggi nilainya terjadi pada tahun 1999/2000 dengan nilai 38,140 triliyun rupiah atau dengan kata lain pertumbuhannya naik sebesar 51,35 persen dari tahun sebelumnya. Subsidi terus diberikan kepada masyarakat pengguna BBM atas dasar pertimbangan untuk kesejahteraan masyarakat. Subsidi terus meningkat sampai

dengan tahun 2000/2001 kembali menurun. Subsidi-subsidi yang dimaksudkan untuk menciptakan suatu struktur insentif ternyata menghasilkan suatu inefisiensi. Banyak sekali contoh –contoh subsidi yang justru dinikmati oleh mereka yang tidak berhak, seperti subsidi BBM, tarif dasar listrik, subsidi bahan pangan , dan sebagainya. Di tingkat teori dan strategis, pemberian subsidi masih dapat dibenarkan sepanjang dirancang untuk memenuhi sasaran yang tepat. Disamping itu , kebijakan insentif perekonomian dalam bentuk penegakan kebijakan persaingan sehat(UU No 5/1999), program –program deregulasi, dan debirokratisasi menjadi sangat relevan untuk segera diberlakukan lebih efektif. Pada tahun anggaran 2001, pemerintah sekali lagi akan menerima ujian berat dalam penyaluran dana pengganti subsidi BBM yang dicabut efektif pada bulan Oktober 2000 (Faisal Basri, 2002:249).

Sebagai faktor utama dalam sektor transportasi bahan bakar minyak terus mengalami peningkatan. Krisis ekonomi menyebabkan melemahnya nilai rupiah yang berdampak langsung terhadap bahan bakar minyak yang terus mengalami peningkatan dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) terus terjadi setiap tahunnya (Bernadus, 2005: 6). Perkembangan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.4 grafik berikut:



Gambar 1.4

Dari gambar 1.4 diatas dapat dilihat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap di Indonesia, khususnya premium yang sebagian besar digunakan dalam kendaraan bermotor dalam kegiatan operasionalnya. Dalam kurun waktu tahun 1996 sampai dengan tahun 2005 telah terjadi berapa kali kenaikan harga bahan bakar minyak. Permintaan akan alat transportasi tentunya akan berhubungan dengan penggunaan bahan bakar dalam kegiatan operasional kendaraan bermotor, jumlah penduduk, panjang jalan yang tersedia dan juga daya beli masyarakat itu sendiri. Dengan asumsi setiap pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor maka penerimaan daerah akan meningkat. Apabila terhadai kenaikan harga minyak maka ratio permintaan kendaraan bermotor akan meningkat. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor ini diiringi dengan pergeseran permintaan kendaraan bermotor, pada saat harga bahan bakar minyak naik maka jumlah kendaraan roda dua juga mengalami kenaikan tetapi

kendaraan roda empat mengalami penurunan. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor sebagai alat transportasi pada akhirnya penerimaan pajak kendaraan bermotor akan meningkat.

Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pertumbuhan ekonomi diukur dari PDRB dan jumlah penduduk. Apabila pertumbuhan ekonomi terus meningkat dari tahun ke tahun (*ceteris paribus*) akan menyebabkan naiknya pendapatan perkapita yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah sehingga kemampuan masyarakat tersebut untuk membeli kendaraan bermotor akan meningkat dan penerimaan pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor akan mengalami peningkatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap permintaan kendaraan bermotor dan dampaknya terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Propinsi Sumatera Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimana pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap permintaan kendaraan bermotor dan dampaknya terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Propinsi Sumatera Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap permintaan kendaraan bermotor dan dampaknya terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Propinsi Sumatera Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh kalangan akademik sebagai bahan referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya
- 2) Sebagai bahan pertimbangan untuk memprediksi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Propinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Operasional

Diharapkan dapat menjadi acuan dalam menganalisis perkembangan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Propinsi Sumatera Selatan. Selain itu juga dapat memberikan masukan atau informasi bagi pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dalam pembuatan kebijakan di masa mendatang yang berkaitan dengan penerimaan daerah sehingga mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar.1984. *Aspek Ekonomi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
Jakarta:Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Badan Pusat Statistik.2005. *Sumatera Selatan dalam Angka 1996-2005*.BPS SumSel.
- Bahtara,Febi.2005.*Faktor-faktor yang mempengaruhi BBNKB di Propinsi Sumatera Selatan*. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Bamim, Selamat.2002.*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Propinsi Sumatera Selatan*. Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
- Basri,Faisal.2002. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta :Erlangga.
- Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.2005.*Dispenda dalam Angka 1996-2005*.Dispenda SumSel.
- Dumairy.1997.*Perekonomian Indonesia*. Jakarta:Erlanga.
- Gujarati, Damodar.1978. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta :Erlangga.
- Guritno. 1998.*Ekonomi Publik*. Yogyakarta :BPFE.
- Hakim.1989. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pajak Tontonan Kota Palembang*.
Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Hosea.2005.*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten OKI*. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Jhingan.Mc.1994. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta :PT Raja Grafindo persada.
- Nachrowi,Djalal.2002. *Penggunaan Teknik Ekonometri*. Jakarta : PT Raja Grafindo persada.

Nahnuddin dan Atik.2005.*Identifikasi Kebijakan Energi di Sektor Transportasi Pasca Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM)*. Jakarta :Warta Perhubungan.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Papanek,F.Gustaf.1987.*Ekonomi Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia.

Pertamina.2005. www.pertamina.go.id

Suparmoko.2001.*Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Sukirno,Sadono.1995.*Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta :PT Raja Grafindo persada.

Sukirno, Sadono.2000.*Makro Ekonomi Modern*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Suwardi, Musyrif.2005.*Pendapatan Daerah(PATDA) Merupakan Salah Satu Faktor Pendukung Kelancaran Berlalu Lintas di Sumatera Selatan*.Palembang:Dispenda.